

PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL & CALL FOR PAPERS

**Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**



Prof Dr. Mahfud MD, SH (Keynote)

Dr. Sulardi, SH., MSi (Narasumber)

Dr. Susianto, SH., MHum., CLA (Narasumber)

Sabtu, 10 Maret 2018

isbn

978-602-61429-1-7

Fakultas Hukum
Universitas Kanjuruhan
Malang
2018

DEWAN REDAKSI PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL & CALL FOR PAPER

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Hukum
Reviewer	:	Abdul Halim, SH, M.Hum Faniko Andiyansyah, SH, M.Kn. Mamluhah, SH, M.Hum.
Ketua Dewan Penyunting	:	Sulthon Miladiyanto,S.H.,M.H
Dewan Penyunting	:	Prof. Dr. Bambang Satriya,SH.,MH Dr. Susianto, SH.,M.Hum.,CLA Dr. Joice Soraya, SH, M.Hum. Miya Savitri,S.Pd.,M.Hum Ririen Ambarsari,SH.,M.Hum Anindya Bidasari, SH, M.Kn. Ariyanti, SH., MH., LLm.
Penyunting Pelaksana	:	Fahmi Arif Zakaria, SH.,M.H
Staff Administrasi	:	Rizal Muchtar A

Penerbit :

Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
Jl. S. Supriadi No. 48 Malang
Telp. (0341) 801488
Email :semnas_fh@unikama.ac.id

Cetakan Pertama, Maret 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan acara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN DEKAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera

Simposium Nasional dan *Call For Papers* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang dengan tema “Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” merupakan agenda rutin Fakultas Hukum dalam upaya peningkatan kapasitas peneliti.

Simposium Nasional dan *Call For Papers* ini mengundang para dosen, praktisi, dan pemerhati hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Melalui Simposium Nasional dan *Call For Papers* ini, juga diharapkan dapat memperluas jejaring kerjasama antar peneliti di perguruan tinggi tersebut, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum.

Atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Kanjuuruhan Malang, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terlaksananya Simposium Nasional dan *Call For Papers* Sipendikum 2018 ini. Simposium Nasional dan *Call For Papers* ini dapat berlangsung dengan sukses berkat usaha Panitia Penyelenggara dan partisipasi Peserta.

Akhir kata, Selamat telah Sukses menyelenggarakan Simposium Nasional dan *Call For Papers* Sipendikum 2018.

Wassalamualaikum wr.wb.

Malang, 10 Maret 2018

Dekan,

Dr. Suciati, SH, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Seminar Nasional dan *Call For Papers* (SIPENDIKUM) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang sebagai wujud kontribusi kami dalam meningkatkan kapasitas ilmu hukum. Seminar Nasional Sipendikum ini mengambil tema: "REKONSTRUKSI HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA". Tema ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini terkadang terjadi benturan atau dissinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, ataupun disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang horizontal atau sederajat. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu.

Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang mengagas forum Simposium Nasional dan call for papers sebagai sarana diskusi, ekplorasi dan integrasi dari berbagai aspek hukum mengenai pengembangan dan penegakan hukum. Selain itu, kapasitas peneliti di perguruan tinggi harus ditingkatkan, agar dapat menghasilkan penelitian yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam kehidupan hukum.

Kegiatan Seminar dan *Call For Papers* ini diawali dengan presentasi dari nara sumber: Ketua MK 2008-2013 yang juga menjabat sebagai Ketua AP HTN HAN, Anggota UKP PIP, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2013-2017, serta Kepala Lab Fakultas Hukum dan Ketua LKBH Universitas Kanjuruhan Malang yang dilanjutkan presentasi secara parallel oleh pemakalah. Dalam seminar nasional ini, kami menerima makalah yang berupa hasil penelitian para dosen dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Makalah yang dinilai layak sesuai penilaian dari tim

penilai, dipresentasikan dan diterbitkan pada Prosiding Simposium Nasional dan *Call For Papers* ini.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta Simposium Nasional dan *Call For Papers* dan pemakalah yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini.

Malang, 10 Maret 2018

Ketua Pelaksana,

Dr. Susianto, SH, M.Hum, CLA

DAFTAR ISI

DEWAN PENYUNTING	i
SAMBUTAN DEKAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv

ASPEK PANCASILA

STRATEGI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN KARAKTER ETIKA MAHASISWA DI STIKOM PGRI BANYUWANGI.....	1-7
<i>Mohamad Dedi, Estu Handayani</i>	

HUKUM PIDANA

PRINSIP MINIMAL PEMBUKTIAN (BEWIJS MINIMUM) DALAM DELIK TINDAK PIDANA SIBER MENURUT KUHAP DAN UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	8-22
<i>Ayu Dian Ningtias</i>	
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI PASCA TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 13 TAHUN 2016.....	23-47
<i>Kristian; Aji Mulyana</i>	
JEMBER UNTUK KOTA LAYAK ANAK: KONTRADIKSI KABUPATEN PENGHASIL TEMBAKAU DAN INISIATIF KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK.....	48-62
<i>Fiska Maulidian Nugroho</i>	
QUO VADIS: PENEGAKAN HUKUM KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA.....	63-76
<i>Ida Zuraida</i>	
THE RIGHT TO BE FORGOTTEN DAN KAITANNYA DENGAN REHABILITASI MANTAN TERDAKWA DENGAN PUTUSAN BEBAS	77-87
<i>Tisa Windayani</i>	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK – ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAK	88-94
<i>Agustin Widjiastuti, Anthonius Adhi Soedibyo</i>	

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX) MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	95-102
<i>Susianto</i>	

HUKUM PERDATA

ASPEK HUKUM WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT YANG DIALIHKAN KEPADА PIHAK KETIGA SECARA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN	103-111
<i>Kasiani</i>	
EKSISTENSI KOPERASI TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM	112-115
<i>Yofiza Media</i>	

HUKUM TATA NEGARA dan HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI	116-123
<i>Nany Suryawati</i>	
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEBAUK	124-133
<i>Jon Hendri, Akmal Indra, Khoiri</i>	
DINAMIKA DEMOKRASI LOKAL DAN POLITIK LOKAL SEBAGAI PENGUATAN BUDAYA POLITIK PADA MASYARAKAT DESA: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA	134-143
<i>Fatkhul Muin, Rani Sri Agustina, Jarkasi Anwar, Pipih Ludia Kirana</i>	
POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	144-154
<i>Anna Triningsih</i>	
PENERAPAN ASAS NETRALITAS APARATUR NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	155-170
<i>Rini Irianti Sundry</i>	
BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNTANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	171-183
<i>Yudi Widagdo Harimurti</i>	
EVALUASI PENTINGNYA PERPU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETATANEGARAAN INDONESIA	184-199
<i>Encik Muhammad Fauzan, Novan Mahendra Putra, Indah Purbasari</i>	
URGENSI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) DALAM PEMBENTUKAN	

UNDANG-UNDANG: EVALUASI CAPAIAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009 DAN TAHUN 2010-2014	200-219
<i>Jamaludin Ghafur</i>	
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA.....	220-239
<i>Rossa Ilma Silfiah</i>	
DALAM PRAKTIK PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN POTENSI KORUPSI (Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Kasus Pemakzulan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo)	240-249
<i>Arasy Pradana A Azis</i>	
IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015)	250-259
<i>Lisma</i>	
DESENTRALISASI DAN EKSISTENSI DESA ADAT DI INDONESIA : SUATU PERBANDINGAN KONSEP BALI AK KA NAGARI DI SUMATERA BARAT DAN DUALITAS DESA DI BALI	260-270
<i>Luh Rina Apriani</i>	
IMPLIKASI KEWENANGAN LEMBAGA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP JENIS, FUNGSI DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUKNYA.....	271-278
<i>Ricca Anggraeni, Muhammad Ihsan Maulana</i>	
TANTANGAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI ERA DIGITAL.....	279-288
<i>Ferdian Andi R</i>	
ADAKAH KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.....	289-294
<i>Tomy Michael</i>	
PENGATURAN PEMBATASAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan No. 57 P/HUM/2017)	295-306
<i>Mustakim</i>	
IMPLEMENTASI PASAL 31 UUD NRI 1945 DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN & PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN	307-320
<i>Suartini Supendi</i>	

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA DALAM INSTRUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.....	321-329
<i>Ali Nasith</i>	

HUKUM BISNIS

PENYITAAN PAJAK TANPA MASALAH (STUDI KASUS TRANSAKSI MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN)	330-338
<i>Didik Hery Santosa</i>	
PENERAPAN PRINSIP <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i> DI INDONESIA.....	339-353
<i>Alum Simbolon</i>	
HARMONISASI <i>BILATERAL INVESTMENT TREATY AGREEMENT</i> SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007.....	354-367
<i>Fries Melia Salviana, Desy Nurkristia Tejawati</i>	
KAJIAN FILOSOFIS EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN	368-380
<i>Hudriyah Mundzir</i>	
INOVASI TEKNOLOGI DAN PENGECUALIAN PERJANJIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA DISRUPTIVE INNOVATION	381-393
<i>Galuh Kartiko</i>	
PRINSIP PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA DALAM SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL WORLD TRADE ORGANIZATION: SUATU TINJAUAN YURIDIS HUKUM	394-409
<i>Maslihati Nur Hidayati</i>	
PRINSIP PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA DALAM SISTEM PERDAGANGAN DISHARMONISASI ATURAN BATASAN USIA PENSIUN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN DI PERUSAHAAN PERSERO.....	410-420
<i>Rena Zefania Ritonga, Vicariya Retnowati Boong</i>	

HUKUM INTERNASIONAL

COPYRIGHT PROTECTION AGAINST TRADITIONAL EXPRESSION IN INDONESIA ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW	421-434
<i>Fithriatus Shalihah</i>	

HUKUM AGRARIA

- PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT (STUDI DI GAMONG UJONG LAMIE DAN ALUE SEUPENG KABUPATEN NAGAN RAYA) 435-450
Said Syahrul Rahmad

- RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL PEMERINTAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DI KECAMATAN PANGKALAN KABUPATEN KARAWANG 451-472
Siti Hamimah

HUKUM ISLAM

- FIKIH KEMASYARAKATAN BANJAR (DIALEKTIKA FIKIH DENGAN REALITAS EMPIRIK MASYARAKAT BANJAR, KALIMANTAN SELATAN) 473-485
Anwar Hafidzi

- LEGISLASI HUKUM ISLAM SEBAGAI *LOGIKAL EXTENTION*
(Sebuah Solusi dalam Penegakan Hukum di Indonesia) 486-498
Suhaimi